

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2022



## PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB

JL. DR. SOETOMO 25 BANGIL

Website : [pn-bangil.go.id](http://pn-bangil.go.id)

Email : [pnbangil@yahoo.co.id](mailto:pnbangil@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dibidang Administrasi teknis Yustisial/Administrasi Kepaniteraan dan dibidang Administrasi Kesekretariatan telah dapat disusun.

Laporan ini telah dilengkapi dengan data-data yang ada diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Bangil kepada publik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan tugas tahun 2022 ini disamping sebagai informasi dan pertanggung jawaban kami kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya juga kepada Pimpinan Mahkamah Agung R.I. untuk dijadikan bahan evaluasi dan rencana tugas dimasa mendatang.

Kami telah berusaha dalam menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas tahun 2022 ini dengan sebaik-baiknya akan tetapi laporan ini tentunya saja masih mengandung kelemahan dan kekurangan, yang tentu perlu untuk disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini untuk masa yang akan datang

Bangil , 31 Desember 2022



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN .....	1
B. VISI DAN MISI .....	4
BAB II KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM .....	5
A. KEADAAN PERKARA .....	5
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	5
- Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	6
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	7
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan kembali .....	8
B. PENYELESAIAN PERKARA .....	9
- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .....	9
- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu .....	10
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK .....	10
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi .....	10
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi .....	11
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( Sertifikasi ISO Pengadilan ) ...	11
- Posbakum .....	12
Sidang Keliling / pelayanan terpadu .....	14
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) .....	15
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....	16
- MUTASI .....	16
- PROMOSI .....	18
- PENSIUN .....	18
- DIKLAT / BIMTEK .....	19
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA & TEKNOLOGI INFORMASI .....	23
A. PENGELOLAAN KEUANGAN .....	23
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .....	24
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI .....	26

- Implementasi e-court .....	26
- Implementasi e-Berpadu.....	28
- Implementasi SIPP .....	30
- Publikasi perkara (one day one publish) .....	30
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	33
- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	33
- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) .....	34
- INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	36
BAB VI PENGAWASAN.....	39
A. PENGAWASAN INTERNAL.....	39
B. EVALUASI .....	41
BAB V PENUTUP .....	42
A. KESIMPULAN.....	42
B. SARAN .....	42

Tabel 1 Perkara Pidana 2022 .....	5
Tabel 2 Perkara Perdata 2022.....	5
Tabel 3 Perkara Pidana Banding 2022 .....	6
Tabel 4 Perkara Perdata Banding 2022 .....	6
Tabel 5 Perkara Pidana Kasasi 2022 .....	7
Tabel 6 Perkara Perdata Kasasi 2022 .....	7
Tabel 7 Perkara Pidana Peninjauan Kembali 2022 .....	8
Tabel 8 Perkara Perdata Peninjauan Kembali 2022 .....	8
Tabel 9 Perkara Pidana yang diputus 2022 .....	9
Tabel 10 Perkara Perdata yang diputus 2022 .....	9
Tabel 11 Perkara Pidana diputus tepat waktu 2022.....	10
Tabel 12 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 2022.....	10
Tabel 13 Data Perkara Perdata Mediasi .....	10
Tabel 14 Data Diversi 2022.....	11
Tabel 15 Realisasi Pagu Anggaran Posbakum 2022 .....	14
Tabel 16 Data Sidang Keliling 2022 .....	14
Tabel 17 Data Sidang Ditempat 2022.....	14
Tabel 18 Data SDM 2022 .....	16
Tabel 19 Data Mutasi Masuk Hakim & Pegawai 2022 .....	17
Tabel 20 Data Mutasi Keluar Hakim & Pegawai 2022 .....	17
Tabel 21 Data Promosi Hakim & Pegawai 2022.....	18
Tabel 22 Data Hakim & Pegawai Pensiun 2022 .....	18
Tabel 23 Data Hakim & Pegawai yang mengikuti diklat 2022.....	20
Tabel 24 Data SDM PN Bangil 2022 .....	22
Tabel 25 Data Realisasi DIPA 01 TA 2022 .....	23
Tabel 26 Data Realisasi DIPA 03 TA 2022 .....	23
Tabel 27 Data Sarana & Prasarana PN Bangil .....	25
Tabel 28 Data Rumah Dinas PN Bangil.....	25
Tabel 29 Data Kendaraan Dinas PN Bangil .....	25
Tabel 30 Data Penerimaan Perkara Melalui E-Court .....	28

Gambar 1 Gedung Kantor PN Bangil.....	2
Gambar 2 Sertifikat Akreditasi PN Bangil .....	12
Gambar 3 MoU Posbakum 2022 .....	13
Gambar 4 MoU Posbakum 2022 .....	13
Gambar 5 E-Court .....	26
Gambar 6 Pojok E-Court PN Bangil .....	27
Gambar 7 E-Berpadu .....	28
Gambar 8 SIPP .....	330
Gambar 9 One Day Publish.....	341
Gambar 10 Surveiln Akreditasi 2022 .....	353
Gambar 11 PTSP PN Bangil .....	374
Gambar 12 Briefing Petugas PTSP .....	375
Gambar 13 Aplikasi Cak Bangil.....	387
Gambar 14 Aplikasi Go PTSP.....	397
Gambar 15 Jalur Disabilitas PN Bangil.....	4038
Gambar 16 Pengarahan Ketua PN Bangil terkait Pengawasan.....	39
Gambar 17 Rapat Hakim Pengawas Bidang.....	40



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Pembangunan nasional merupakan usaha mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Salah satu sektor pembangunan yang tidak kalah penting dari sektor – sektor yang lain adalah pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum harus diselenggarakan sebagai pembangunan integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Indonesia sebagai Negara Hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, dengan demikian seluruh komponen bangsa, baik sebagai Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat harus menghormati hukum dan menegakkan aturan hukum yang berlaku di Negara kita ini, termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Bangil sebagai bagian dari sub sistem dalam Sistem Peradilan Indonesia.



*Gambar 1. Gedung Kantor PN Bangil*

Yudikatif sebagai satu bagian dari Lembaga Penegakan Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi

layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Bangil merupakan suatu Lembaga Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dimana dalam Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat adanya asas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Untuk mewujudkan supremasi hukum ini tentunya diperlukan suatu tindakan nyata yang terencana dalam suatu program kerja dan kegiatan kerja kedepan yang merupakan implementasi pemenuhan harapan-harapan masyarakat pencari keadilan.

Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan:

- pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
- peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
- memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan



- Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
- Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk berlaku adil, jujur berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut :

- A. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat ;
- B. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran;
- C. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak ;
- D. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi ;
- E. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib ;
- F. Menyelenggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## B. VISI DAN MISI

Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil, disamping harus ditunjang adanya sarana dan prasarana gedung dan fasilitas gedung yang memadai, juga perlu dilakukan adanya pembinaan, pengelolaan dan pembenahan administrasi baik administrasi Peradilan maupun administrasi umum dan Sumber Daya Manusia, baik Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial maupun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial dan pada akhirnya adanya evaluasi dan pengawasan internal sebagai bagian integral dari perwujudan kebijakan umum peradilan yang akan dijabarkan secara detail lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Visi Pengadilan Negeri Bangil adalah **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang Agung”**. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah:

- 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil.
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil.
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil.

## BAB II KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

### A. KEADAAN PERKARA

#### - Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Rekapitulasi keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### Perkara Pidana:

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus	Sisa Tahun 2022
Pidana Biasa	51	578	520	109
Pidana Cepat	0	96	96	0
Pidana Singkat	0	2	2	0
Pidana Anak	0	11	10	1
Pidana Diversi	0	7	3	0
Restoratif justice	0	2	2	0
Pidana Lalu-lintas	0	17595	17595	0
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>18306</b>	<b>18231</b>	<b>110</b>

*Tabel 1 Perkara Pidana 2022*

##### Perkara Perdata:

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Dicabut	Digugurkan	Sisa Tahun 2022
Gugatan	17	59	64	6	0	12
Permohonan	8	289	286	12	0	8
Gugatan Sederhana	0	62	60	0	6	2
Bantahan	1	1	1	0	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>23</b>

*Tabel 2 Perkara Perdata 2022*

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Rekapitulasi keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bangil pada Tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum di tingkat Banding adalah sebagai berikut:

**Perkara Pidana:**

<b>Keterangan</b>	<b>Banding</b>
<b>Sisa Tahun 2021</b>	<b>0</b>
<b>Masuk Tahun 2022</b>	<b>107</b>
<b>Dicabut/ putus</b>	<b>86</b>
<b>Belum putus</b>	<b>10</b>
<b>Dikirim (ke PT dan ke MA)</b>	<b>96</b>
<b>Belum Dikirim</b>	<b>10</b>

*Tabel 3 Perkara Pidana Banding 2022*

**Perkara Perdata:**

<b>Keterangan</b>	<b>Banding</b>
<b>Sisa Tahun 2021</b>	<b>3</b>
<b>Masuk Tahun 2022</b>	<b>20</b>
<b>Dicabut</b>	<b>18</b>
<b>Putus</b>	<b>18</b>
<b>Dikirim (ke PT dan ke MA)</b>	<b>20</b>
<b>Sisa/Belum Dikirim</b>	<b>3</b>

*Tabel 4 Perkara Perdata Banding 2022*

- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Rekapitulasi perkara di Pengadilan Negeri Bangil pada Tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum di tingkat Kasasi adalah sebagai berikut:

**Perkara Pidana:**

<b>Keterangan</b>	<b>Kasasi</b>
<b>Sisa Tahun 2021</b>	<b>0</b>
<b>Masuk Tahun 2022</b>	<b>64</b>
<b>Dicabut/Putus</b>	<b>61</b>
<b>Belum putus</b>	<b>3</b>
<b>Dikirim (ke PT dan ke MA)</b>	<b>61</b>
<b>Sisa/Belum Dikirim</b>	<b>3</b>

*Tabel 5 Perkara Pidana Kasasi 2022*

**Perkara Perdata:**

<b>Keterangan</b>	<b>Kasasi</b>
<b>Sisa Tahun 2021</b>	<b>3</b>
<b>Masuk Tahun 2022</b>	<b>13</b>
<b>Dicabut</b>	<b>10</b>
<b>Putus</b>	<b>10</b>
<b>Dikirim (ke PT dan ke MA)</b>	<b>16</b>
<b>Sisa/Belum Dikirim</b>	<b>0</b>

*Tabel 6 Perkara Perdata Kasasi 2022*

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan kembali**

Rekapitulasi keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum di tingkat Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

**Perkara Pidana:**

<b>Keterangan</b>	<b>Peninjauan Kembali</b>
<b>Sisa Tahun 2021</b>	<b>3</b>
<b>Masuk Tahun 2022</b>	<b>7</b>
<b>Dicabut</b>	<b>5</b>
<b>Dikirim (ke PT dan ke MA)</b>	<b>7</b>
<b>Sisa/Belum Dikirim</b>	<b>0</b>

*Tabel 7 Perkara Pidana Peninjauan Kembali 2022*

**Perkara Perdata:**

<b>Keterangan</b>	<b>Peninjauan Kembali</b>
<b>Sisa Tahun 2021</b>	<b>1</b>
<b>Masuk Tahun 2022</b>	<b>2</b>
<b>Dicabut/putus</b>	<b>1</b>
<b>Dikirim (ke PT dan ke MA)</b>	<b>2</b>
<b>Sisa/Belum Dikirim</b>	<b>0</b>

*Tabel 8 Perkara Perdata Peninjauan Kembali 2022*



## B. PENYELESAIAN PERKARA

### - Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

#### Jumlah sisa perkara Pidana yang diputus:

Rekapitulasi Perkara Pidana pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus	Sisa Tahun 2022
Pidana Biasa	51	578	520	109
Pidana Cepat	0	96	96	0
Pidana Singkat	0	2	2	0
Pidana Anak	0	11	10	1
Diversi	0	7	3	0
Restoratif justice	0	2	2	0
Pidana Lalu-lintas	0	17595	17595	0
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>18306</b>	<b>18231</b>	<b>110</b>

*Tabel 9 Perkara Pidana yang diputus 2022*

#### Jumlah sisa perkara Perdata yang diputus:

Rekapitulasi Perkara Perdata pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Dicabut	Digugurkan	Sisa Tahun 2022
Gugatan	17	59	64	6	0	12
Permohonan	8	289	286	12	0	8
Gugatan Sederhana	0	62	60	0	6	2
Bantahan	1	1	1	0	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>23</b>

*Tabel 10 Perkara Perdata yang diputus 2022*

- **Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

Rekapitulasi Perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

Jangka waktu	Perdata	Pidana
Kurang dari 4 bulan	388	626
4 bulan sampai 5 bulan	9	2
Lebih dari 5 bulan	9	0
6 sampai 12 bulan	5	0
Lebih dari 12 bulan	0	0
<b>Total</b>	<b>411</b>	<b>628</b>

*Tabel 11 Perkara Pidana diputus tepat waktu 2022*

- **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK**

Perkara	Putus Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
		Banding	Kasasi	PK	
Pidana	628	521	0	0	
Perdata	411	391	286	81	
<b>Jumlah</b>	<b>1039</b>	<b>912</b>	<b>286</b>	<b>81</b>	

*Tabel 12 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 2022*

- **Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi**

Perkara	Mediasi		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Perdata	5	41	Berhasil dengan akta perdamaian: 5 Berhasil Sebagian: 0 Berhasil dengan pencabutan: 0 Gagal (tidak berhasil): 41 Gagal (tidak dapat dilaksanakan): 1

*Tabel 13 Data Perkara Perdata Mediasi*

- **Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi**

Perkara	Diversi		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Pidana	3	4	<b>Berhasil dengan akta perdamaian: 3</b> <b>Berhasil Sebagian: 0</b> <b>Berhasil dengan pencabutan: 0</b> <b>Gagal (tidak berhasil): 0</b> <b>Gagal (tidak dapat dilaksanakan): 4</b>

*Tabel 14 Data Diversi 2022*

### **C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)**

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum adalah program penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan peradilan umum sesuai ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan. Program ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).



*Gambar 2 Sertifikat Akreditasi PN Bangil*

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah menetapkan Standarisasi Pelayanan Pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat pencari keadilan maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang hukum lainnya, yang dikenal dengan Sistem Akreditasi. Pengadilan Negeri Bangil telah mengikuti proses Sertifikasi Akreditasi sejak awal bulan januari tahun 2017 dan telah dinyatakan memenuhi Standart Akreditasi dengan Predikat "A" Excellent,

dari Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH di Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017. Hal ini tentunya akan menjadikan pengingat bagi Pengadilan Negeri Bangil untuk harus terus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

#### - **Posbakum**

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi,

konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.



*Gambar 3 MoU Posbakum 2022*



*Gambar 4 MoU Posbakum 2022*

- Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bangil:

No	Jenis Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	Honor Advokat / Pengelola piket	24.000.000	24.000.000	100,00

*Tabel 15 Realisasi Pagu Anggaran Posbakum 2022*

- **Sidang Keliling / pelayanan terpadu**

Dalam Perma No. 1 Tahun 2014, disebutkan bahwa sidang keliling adalah pelaksanaan dari Sidang diposbakum Pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala dan sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan.

Pengadilan Negeri Bangil tidak melakukan sidang keliling dikarenakan tidak tersedia sarana gedung untuk melaksanakan sidang keliling, tetapi Pengadilan Negeri Bangil telah mengadakan sidang ditempat untuk perkara pelanggaran lalu-lintas yang bekerjasama dengan Polres Pasuruan, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kab. Pasuruan.

- Data sidang keliling (*zetting plaat*) bulan Januari – Desember 2022

No	Tanggal Sidang	Jumlah Perkara
1	9 Maret 2022	31 perkara

*Tabel 16 Data Sidang Keliling 2022*

- Data sidang ditempat (perkara pelanggaran lalulintas) bulan Januari – Desember 2022

No	Tanggal Sidang	Jumlah Perkara
		<b>NIHIL</b>

*Tabel 17 Data Sidang Ditempat 2022*



- **Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)**

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Pihak yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bangil terdapat 4 perkara prodeo murni (pembebasan biaya perkara), 3 telah diputus.

## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka meningkatkan kinerja guna mewujudkan peradilan yang agung, telah memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban satuan kerja. Adapun sumber daya manusia tersebut terdiri atas tenaga teknis peradilan, pejabat struktural, staf pelaksana, dan tenaga honorer.

Suber Daya Manusia (SDM) Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan bulan Desember 2022 terdiri dari:

Jabatan	Jumlah
Ketua	1
Wakil Ketua	1
Hakim	10
Sekretaris	1
Panitera	1
Panitera Muda	3
Kasub Bagian	3
Panitera Pengganti	10
Jurusita	2
Jurusita Pengganti	2
Staf Fungsional	8
<b>JUMLAH</b>	<b>42</b>

*Tabel 18 Data SDM 2022*

### - MUTASI

Selama tahun 2022 terdapat 8 (Delapan) orang yang dimutasikan ke Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

No	Nama	Mutasi Masuk	Tanggal Mutasi
1	AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H.	PN Kotabaru	12-02-2022
2	EVA MEITA THEODORA PASARIBU, S.H.	PN Tamiang Layang	28-12-2022
3	EDI ROSADI, S.H., M.H.	PN Sampit	04-07-2022
4	SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, S.H., M.H.	PN Sidoarjo	01-03-2022
5	DIAH EKA PURNAMASARI, S.H., M.H.	PN Surabaya	20-05-2022
6	SUSANAWATI, S.H.	PN Surabaya	20-05-2022
7	WIJI SOEMIARSIH, S.H., M.H.	PN Sidoarjo	04-07-2022
8	BIMA ARDIANSAH RIZKIANU, S.H, M.Hum.	PN Malang	01-12-2022

*Tabel 19 Data Mutasi Masuk Hakim & Pegawai 2022*

Adapun untuk mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Bangil, selama tahun 2022 terdapat 11 (Sebelas) orang sebagai berikut:

No	Nama	Mutasi Keluar	Tanggal Mutasi
1	BAMBANG TRIKORO, S.H., M. Hum.	PN Batam	11-04-2022
2	AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H.	PN Karawang	28-12-2022
3	OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H.	Mahkamah Agung	18-02-2022
4	HADI EDIYARSIH, S.H, M.H.	PN Bogor	09-09-2022
5	YOGA PERDANA, S.H.	PN Banyuwangi	23-12-2022
6	DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.	PN Sumber	23-12-2022
7	WAWAN PRIHIDAYANTO, S.H.	PN Pasuruan	28-08-2022
8	DIYANTO WARDOYO, S.H.	PT Surabaya	28-11-2022
9	DASMA ALFRIANI DAMANIK, S.Pd., M.Si	PN Sidoarjo	05-12-2022
10	YULIANA ADI SAPUTRI, S.H. M. Hum.	PN Pasuruan	01-12-2022
11	RUCHOYAH, S.H.	PN Pasuruan	01-12-2022

*Tabel 20 Data Mutasi Keluar Hakim & Pegawai 2022*

## - PROMOSI

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangil terdapat promosi jabatan sebanyak 13 (Tiga Belas) orang sebagai berikut:

No	Nama	Mutasi Keluar	SK Promosi
1	BAMBANG TRIKORO, S.H., M. Hum.	Wakil Ketua PN Batam	67/KMA/SK/2022 tanggal 25 Februari 2022
2	AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H.	Ketua PN Karawang	2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11 November 2022
3	OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung	27/KMA/SK/I/2022 tanggal 21 Januari 2022
4	HADI EDIYARSAH, S.H, M.H.	Hakim PN Bogor	2101/DJU/KP04.4/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022
5	YOGA PERDANA, S.H.	Hakim PN Banyuwangi	2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11 November 2022
6	DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.	Hakim PN Sumber	2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11 November 2022
7	DIYANTO WARDOYO, S.H.	Panitera Pengganti PT Surabaya	2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
8	WIJI SOEMIARSIH, S.H., M.H.	Panmud Hukum PN Bangil	154/KMA/SK/V/2022 tanggal 17 Mei 2022
9	WIJI SOEMIARSIH, S.H., M.H.	Panmud Perdata PN Bangil	2444/DJU/SK/KP04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
10	BIMA ARDIANSAH RIZKIANU, S.H, M.Hum.	Panmud Hukum PN Bangil	2443/DJU/SK/KP04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
11	WAWAN PRIHIDAYANTO, S.H.	Kasubbag PTIP PN Pasuruan	944/SEK/Kp.I/SK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022
12	YULIANA ADI SAPUTRI, S.H. M. Hum.	Panmud Hukum PN Pasuruan	2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
13	RUCHOYAH, S.H.	Panitera Pengganti PN Pasuruan	2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022

*Tabel 21 Data Promosi Hakim & Pegawai 2022*

## - PENSUN DAN MENINGGAL DUNIA

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangil terdapat 1 pegawai yang purna bakti (pensiun) dan 1 pegawai yang meninggal dunia:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pensiun
1	IDA SULISTYAWATI, S.H	Panitera Muda Hukum	11-05-2022 (Meninggal Dunia)
2	ROHMANA HANIK, S.H	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	01-11-2022

*Tabel 22 Data Hakim & Pegawai Pensiun 2022*

## - DIKLAT / BIMTEK

Selama tahun 2022 yang mengikuti diklat pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN DIKLAT
1	Seluruh Panitera Pengganti	Pejabat Fungsional / Para Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia.
2	Abang Marthen Bunga, S.H. M.Hum., Dony Riva Dwi Putra, S.H. dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
3	Abang Marthen Bunga, S.H. M.Hum.	Hakim	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Elementary bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
4	Budi Hartono	Jurusita	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
5	Arizal Anwar, S.H., M.H.	Ketua	Pemanggilan Pengajar Muatan Lokal Administrasi Umum pada Latsar CPNS Gelombang II Golongan II Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Secara Online
6	Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. dan Indra Cahyadi, S.H., M.H	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVII Tahun 2022
7	Dimas Putra Kusuma Wardhana, S.E., I Putu Bhisama Labdajaya, S.H., I Putu Bimbisara Wimuna	CPNS	Pemanggilan Peserta Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Learning

	Raksita, S.H., Sonya MD Siregar, A. Md. dan Vetra Michael Pradana Hutagaol, A. Md.		Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2022.
8	Fitiria H. Ginting, S.H., M.Kn. dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bagi Hakim Peradilan Umum Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI
9	Nurindah Pramulia, S.H. M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Penghapusan Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Hakim Tingkat Pertama Seluruh Indonesia TA. 2022
10	Arizal Anwar, S.H., M.H.	Ketua	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas Mahkamah Agung RI Tahun 222

*Tabel 23 Data Hakim & Pegawai yang mengikuti diklat 2022*

### **Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil.**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Arizal Anwar, S.H., M.H.	Ketua	
2	Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.	Wakil Ketua	
3	Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.	Hakim	
4	Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.	Hakim	
5	Edi Rosadi, S.H., M.H.	Hakim	
6	Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.	Hakim	
7	Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum.	Hakim	
8	Nurindah Pramuliah, S.H., M.H.	Hakim	
9	Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.	Hakim	
10	Faqihna Fiddin, S.H., M.H.	Hakim	
11	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim	



12	Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.	Hakim	
13	Raden Agusdiono, S.H., M.H.	Panitera	
14	Mochamad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris	
15	Wiji Soemiarsih, S.H.	Panmud Perdata	
16	Hanafi, SH.	Panmud Pidana	
17	Bima Ardiansah Rizkianu. S.H., M.Hum.	Panmud Hukum	
18	Agus Riyanto, S.H.	Kasubbag PTIP	
19	Teddy Hera Witomo, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
20	Dara Kusuma Citra Pratiwi. S.H.	Plt. Kasubbag Kepegawaian & Ortala / Bendahara	
21	H.M. Khozin, S.H.	Panitera pengganti	
22	Triali Eboh, S.H.	Panitera pengganti	
23	Koirot, S.H.	Panitera pengganti	
24	Rudiyanto, S.H.	Panitera pengganti	
25	Akhmad Taufik, S.H.	Panitera pengganti	
26	Moh. Romli, S.H.	Panitera pengganti	
27	Agus Riyanto, S.H.	Panitera pengganti	
28	Satyuni Kariesta Methandary Swenda S.H., M.H.	Panitera pengganti	
29	Diah Eka Purnamasari S.H., M.H.	Panitera pengganti	
30	Susanawati S.H.	Panitera pengganti	
31	Akhmad Dahlan, S.H.	Jurusita/ Diperbantukan Bag. Kepaniteraan Pidana	
32	Budi Hartono	Jurusita/ Diperbantukan Bag. Kepaniteraan Pidana	
33	Warda Latifa, S.H.	Jurusita Pengganti/ Diperbantukan Bag. Kepaniteraan Hukum	
34	Kukuh Yuda Ari Sanjaya, S.E., S.H.	Jurusita Pengganti/Diperbantu kan Bag. Umum dan Keuangan	
35	Nita Anggraini, S.H.	Staf Pidana	
36	Dimas Putra Kusuma Wardhana, S.E.	Staf PTIP	
37	I Putu Bhisama Labdajaya, S.H.	Staf Pidana	
38	I Putu Bimbisara Wimuna Raksita, S.H.	Staf Pidana	
39	Nur Azizah, A.Md.	Staf Perdata	

<b>40</b>	Sonya MD Siregar, A.Md. A.k.	Staf Umum dan Keuangan	
<b>41</b>	Vetra Michael Pradana Hutagaol, A.Md.	Staf Pidana	
<b>42</b>	Sugiman	Staf Umum dan Keuangan	

*Tabel 24 Data SDM PN Bangil 2022*

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Bangil mendapat 2 anggaran DIPA, dengan rincian :

No.	Kode Satker	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	098324	Belanja Pegawai	5.514.237.000	6.149.993.128	111,53
		Belanja Barang	1.686.318.000	1.686.237.720	100
		Belanja Modal	104.500.000	104.200.000	99,71
<b>JUMLAH</b>			<b>8.240.515.000</b>	<b>8.233.718.903</b>	<b>108,70</b>

*Tabel 25 Data Realisasi DIPA 01 TA 2022*

No.	Kode Satker	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	099157	Belanja Pegawai	0	0	0
		Belanja Barang	221.835.000	221.763.590	99,97
		Belanja Modal	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>221.835.000</b>	<b>221.763.590</b>	<b>99,97</b>

*Tabel 26 Data Realisasi DIPA 03 TA 2022*

#### - Penerimaan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi bagi pendapatan Negara. Realiasi PNBP pada tahun anggaran 2022 dari penerimaan perkara sebesar Rp. 71.380.000,- dan penerimaan non perkara Rp. 5.218.259,-

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung.

Gedung kantor Pengadilan Negeri Bangil terletak di Jl. Dr. Soetomo no. 25 Bangil menempati tanah seluas 2.852 M<sup>2</sup>, yang di atasnya dibangun bangunan gedung kantor berlantai 2 seluas 2200 M<sup>2</sup>, dengan rincian luas lantai 1 = 1200 M<sup>2</sup>, luas lantai 2 = 1000 M<sup>2</sup>, Sisanya digunakan untuk sarana jalan, taman dan area parkir seluas 652 M<sup>2</sup>.

Selain itu Pengadilan Negeri Bangil juga memiliki 7 (tujuh) unit rumah dinas yaitu: 1 (satu) unit rumah dinas Ketua, 1 (satu) unit rumah dinas Wakil Ketua dan 5 (lima) unit rumah dinas Hakim. Semua rumah dinas adalah rumah negara golongan I permanen dengan luas bangunan kurang lebih 70 M<sup>2</sup>.

#### Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Bangil

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	4	
7	Ruang Kepaniteraan	3	
8	Ruang Kesekretariatan	3	
9	Ruang Arsip	1	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang Panitera Penganti	1	
12	Ruang Posbakum	1	
13	Ruang PTSP + Ruang Tamu Terbuka	1	
14	Ruang Aula	1	
15	Ruang Command Center	1	

16	Ruang Mediasi	1	
17	Ruang Diversi/Kaukus	1	
18	Ruang Poliklinik	1	
19	Ruang Laktasi	1	
20	Ruang Ramah Anak	1	
21	Ruang Tahanan & Ruang Anak Berhadapan dengan Hukum	3	
21	Ruang Jaksa	1	
22	Ruang Pekerja Sosial	1	
23	Toilet Pegawai	2	
24	Toilet Pengunjung	2	1 Toilet Umum, 1 Toilet Difabel.
25	Jalur Disabilitas	1	Terhubung keliling Gedung dan ruang sidang

Tabel 27 Data Sarana & Prasarana PN Bangil

### Rumah Dinas

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
1	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1			
3	Rumah Dinas Hakim	5	4	1		

Tabel 28 Data Rumah Dinas PN Bangil

### - Kendaraan Dinas

NO	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1	Terios	1	2011	1			
2	Kijang Innova	1	2006	1			
3	Kijang Innova	1	2022	1			Sewa
4	Toyota Fortuner	1	2021	1			Pinjam Pakai Pemda
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1	Supra X 125	2	2008		1		

Tabel 29 Data Kendaraan Dinas PN Bangil

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### - Implementasi e-court



*Gambar 5 E-Court*

Pengadilan Negeri Bangil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan telah memberlakukan Administrasi perkara secara elektronik karena ini merupakan tuntutan dan perkembangan

zaman, sehingga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dilakukan untuk mencapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009.

Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum pelaksanaan e-court ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Dalam pelaksanaan e-court ini sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum terdapat 5 ketentuan baru yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Hukum secara elektronik adalah pengajuan upaya hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan Aplikasi e-court.
2. Calon pengguna terdaftar adalah setiap orang yang akan melakukan pendaftaran pada aplikasi e-court.
3. Aplikasi pendukung tatakelola administrasi perkara: Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EIS), Sistem Informasi Manajemen Tatalaksana Perkara (SIMTALAK), E-Register, E-Keuangan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat (PTSP).
5. Meja e-court adalah salah satu bentuk layanan yang membantu para pihak yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Dalam perkembangannya pada tahun 2021, Mahkamah Agung mengembangkan E-Court dengan menambahkan fitur eLitigasi dengan sub fitur:

- Jadwal sidang yang terintegrasi dengan SIPP.
- Penyampaian Dokumen oleh para pihak.
- Verifikasi dokumen oleh Majelis Hakim.



*Gambar 6 Pojok E-Court PN Bangil*

Pengadilan Negeri Bangil sendiri sudah mengimplementasikan e-court dalam Perkara Gugatan, Gugatan sederhana maupun Permohonan. Dengan Rincian Perkara yang menggunakan e-court pada Tahun 2022 yaitu:

No.	Nama Perkara	Jumlah Perkara
1	Gugatan	70 perkara
2	Gugatan Sederhana	38 perkara
3	Permohonan	150 perkara
4	Bantahan	4 Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>262 Perkara</b>

*Tabel 30 Data Penerimaan Perkara Melalui E-Court*

#### - Implementasi e-BERPADU



*Gambar 7 e-Berpadu*

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak



Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

## - Implementasi SIPP



*Gambar 8 SIPP*

Pengadilan Negeri Bangil dalam Pelayanannya kepada masyarakat pencari keadilan telah membuka akses informasi seluas-luasnya untuk publik dengan didukung oleh penerapan Teknologi Informasi yang terus dikembangkan setiap tahun. Pada pelaksanaannya Pengelolaan

Teknologi Informasi ini di bawah langsung sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) tetapi didukung juga dengan pembentukan Tim Teknologi Informasi (IT) dengan Penanggung jawab langsung Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang dikoordinir oleh Wakil Ketua, Humas, Panitera dan Sekretaris serta pelaksanaannya adalah dari semua bidang baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.

## - Publikasi perkara (one day one publish)

Perkembangan teknologi informasi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan IT.

Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi 'semangat jaman' yang tak terbendung. Satu hal yang patut dicatat, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas serta mengandung prinsip: kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses dan sebagainya akan sangat sulit

diimplementasikan dalam tugas sehari-harinya bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya.



*Gambar 9 One Day Publish*

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam mengembangkan teknologi informasi (IT) sebagai wujud menciptakan good

governance pada pengadilan

Negeri Bangil, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- c. SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
- d. SK. KMA No. 1-144 Tahun 2011 Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil

1. Menyediakan informasi yang akurat mengenai perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bangil.
2. Meningkatkan transparansi peradilan melalui penyediaan website yang mampu untuk menyampaikan informasi mengenai SOP penerimaan perkara, SOP pengembalian sisa panjar, jadwal sidang, putusan pengadilan dan informasi penting lainnya.

3. Mendukung sistem teknologi informasi Pengadilan Negeri Bangil melalui penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi yang handal dan penyediaan tenaga ahli teknis Teknologi Informasi yang terlatih.

4. Meningkatkan akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri dan lebih jauh lagi memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil.

Pada saat ini dilingkungan Pengadilan Negeri Bangil, Website sudah terupdate, di bidang administrasi kesekretariatan telah menggunakan SABMN dan KOMDANAS di bidang keuangan SIMAK, SAKPA dan SAKTI yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan barang-barang milik Negara yang ada di Pengadilan Negeri Bangil. Di Bidang Kepaniteraan ada aplikasi CTS atau SIPP yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan juga ada aplikasi KOMDANAS, dan di bidang kepegawaian ada SIKEP.

Implementasi atau pelaksanaan dari point-point tersebut semuanya telah dapat dilihat dan diakses oleh publik/masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Bangil. Itu semua merupakan wujud keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka ikut menciptakan good governance dengan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan IT yang saat ini telah semakin maju dan berkembang pesat.

## BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### - AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum adalah program



*Gambar 10 Surveilans Akreditasi 2022*

penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan peradilan umum sesuai ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent,

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan. Program ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah menetapkan Standarisasi Pelayanan Pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat pencari keadilan maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang hukum lainnya, yang dikenal dengan Sistem Akreditasi. Pengadilan Negeri Bangil telah mengikuti proses Sertifikasi Akreditasi sejak awal bulan Januari tahun 2017 dan telah dinyatakan memenuhi Standart Akreditasi dengan Predikat “A” Excellent, dari Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH di Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017. Hal ini tentunya akan menjadikan pengingat bagi Pengadilan Negeri Bangil untuk harus terus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

#### - PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



*Gambar 11 PTSP PN Bangil*

Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka ikut menciptakan good governance dengan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme kepada masyarakat pencari

keadilan yaitu dengan diadakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan system pelayanan. Hal ini sesuai dengan keputusan direktur badan peradilan umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.



*Gambar 12 Briefing Petugas PTSP*

Adapun yang menjadi dasar hukum diadakanya pelayanan terpadu satu pintu ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 076/KM/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non yudisial nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang pedoman pelayanan informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan dan standar meja informasi di pengadilan;

- **INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka ikut menciptakan good governance dengan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme kepada masyarakat pencari keadilan yaitu dengan membuat beberapa inovasi – inovasi sebagai berikut:

1. Antrian Tamu adalah aplikasi yang memberikan rasa aman, nyaman dan tertib kepada masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh pelayan di Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB.
2. ALAIKUM adalah merupakan Aplikasi Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Bangil.



3. Whatsapp Cak Bangil adalah Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan tentang pengadilan



*Gambar 13 Aplikasi Cak Bangil*

Negeri Bangil Kelas IB dengan menggunakan sarana Teknologi Handphone yaitu melalui aplikasi watshapp.

4. Android Go PTSP PN Bangil, Aplikasi ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat pencari keadilan tanpa harus hadir ke kantor Pengadilan Negeri Bangil.



*Gambar 14 Aplikasi Go PTSP*

5. Antrian sidang yaitu aplikasi yang dibuat agar proses persidangan berjalan dengan tertib sesuai dengan nomer urut pendaftaran sidang pada tiap – tiap ruang sidang.

6. Jalur Khusus Difabel yaitu jalur atau akses jalan yang diperuntukan untuk kaum penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Bangil.



*Gambar 15 Jalur Disabilitas PN Bangil*

## BAB VI PENGAWASAN

### A. PENGAWASAN INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016, tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

#### **Pengawasan Melekat (WASKAT)**

Pengawasan melekat adalah pengawasan terhadap tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan masing-masing sebuah institusi. Pada Pengadilan Negeri Bangil pelaksanaan waskat telah berjalan cukup baik.



*Gambar 16 Pengarahan Ketua PN Bangil terkait Pengawasan*

Pengadilan Negeri Bangil juga ada Pengawasan Bidang Tugas, yang merupakan. Pengawasan terhadap seluruh Pegawai dan semua unsur, mulai Hakim, Pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan, Pejabat Struktural maupun Fungsional yang dilakukan oleh pimpinan (Ketua) dengan menunjuk beberapa Hakim sebagai Hakim

Pengawas Bidang untuk melakukan tugas pengawasan bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Juli 2022 nomor: W14.U21/1979/KP.01.2/7/2022, tentang penunjukan hakim pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Bangil. Adapun nama-nama yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah:



*Gambar 17 Rapat Hakim Pengawas Bidang*

1. AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H., M.H. Koordinator Hakim Pengawas Bidang
2. AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,M.H dan YOGA PERDANA, S.H. Sebagai Hakim Pengawas PTSP
3. INDRA CAHYADI, S.H., M.H. dan AGUSTINUS SAYUR MATUA PURBA, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Pidana dan Wasmat
4. Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Perdata
5. YOGA PERDANA, S.H. dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, S.H. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum.

6. EDI ROSADI, S.H., M.H. dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
7. ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum. Dan FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H.M.Kn. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
8. DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., M.H. dan FAQIHNA FIDDIN, S.H. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Monitoring SIPP dan MIS.

## **B. EVALUASI**

- Setiap bulan diadakan Rapat Bulanan / Rutin untuk mengevaluasi kinerja dan hasil kerja pegawai.
- Evaluasi dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan semester dan akhir tahun. Pengadilan Negeri Bangil menerapkan reward and punishment dalam pelaksanaan kerja. Salah satu metode yang dilakukan agar dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja dari aparatur sipil negara di Pengadilan Negeri Bangil, antara lain dengan menetapkan Pegawai Role Model tiap 6 bulan. Penunjukan Pegawai Role Model ini didasarkan pada beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terutama dalam hal profesionalisme dan disiplin pegawai.

## BAB VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bangil bila dibandingkan antara perkara yang diterima dan yang diputus serta tenaga Hakim yang ada, sudah sangat baik terbukti dengan capaian presentase pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 presentase penanganan perkara telah mencapai 87,77 %.
2. Pelaksanaan administrasi perkara dengan pola BINDALMIN No.KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun masih perlu disempurnakan.
3. Pembinaan dan pengawasan sudah dilaksanakan cukup baik.

### B. SARAN

1. Pengadilan Negeri Bangil sangat membutuhkan penambahan pegawai, mengingat dengan beban kerja yang bertambah serta adanya pegawai yang telah dan akan dimutasikan ke tempat lain.
2. Dalam rangka pembinaan menuju profesionalisme pegawai perlu adanya peningkatan diklat pegawai sesuai dengan sarannya.
3. Dengan tidak terdapatnya SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Bangil memerlukan pegawai dengan lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT dan jaringan.